

Interkoneksi PTKIS dan BMT NU Dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Lokal Melalui BumDesma Berbasis Tata Kelola Keuangan Syariah di Cermee Bondowoso

Mustaqim Makki¹, Zaini Miftah²
STAI Nurul Huda Kapongan Situbondo¹
STIS Darul Falah Bondowoso²
mustaqimmakky@gmail.com
zen.miftah87@gmail.com

Abstract

Universities are required to contribute to the development of science and solve social or economic problems faced by society by conducting collaborative research with industrial partners or other institutions by involving lecturers and students and the community. Higher Education partnerships with related agencies certainly refer to the good relations that have been built with the concept of interconnection with the community. Guided by the Research and Service Road Map that has been designed by LP2M through an MoU with several institutions, including: BMT NU (Baitul Mall Wat Tamwil- Nuansa Ummat), NU Care - Lazisnu and Non-Governmental Organizations. Integration of partnerships built by Universities with several Agencies as academic activities of student lecturers in embodying Higher Education's Tridarma such as KKN, PPL and Service and Research to develop scientific treasures. In university partnerships with BMT NU or Baitul Mal Wattamwil NU in managing Bumdesma funds, the PAR approach can be used to directly involve all related parties. Students and local community members can work together to plan strategies for using funds, find Bumdesma problems, and find creative solutions. The involvement and presence of tertiary institutions in Bumdesma assistance can provide benefits to campuses, financial institutions, Bumdes and Bumdesma managers and the wider community. The success of Bumdesma is largely determined by the ability of its management to manage the organization and activities carried out, so that the products and services produced have comparative advantages compared to competitors. Therefore good and mature planning is needed to be able to achieve BUMDesma goals even in an uncertain business

environment. Good planning Village business entities must be economical, efficient and effective.

Keywords: PTKIS, BMT-NU, BumDesma, Financial governance.

Abstrak

Perguruan tinggi dituntut untuk berkontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan dan menyelesaikan masalah sosial atau ekonomi yang dihadapi masyarakat dengan melakukan riset kolaboratif dengan mitra industri atau lembaga lainnya dengan melibatkan dosen dan mahasiswa serta masyarakat. Kemitraan Perguruan Tinggi dengan instansi terkait tentu mengacu terhadap jalinan hubungan baik yang telah dibangun dengan konsep interkoneksi dengan masyarakat. Dengan berpedoman kepada Road Map Penelitian dan Pengabdian yang telah dirancang oleh LP2M melalui MoU dengan beberapa Lembaga antara lain: BMT NU (Baitul Mall Wat Tamwil- Nuansa Ummat), NU Care - Lazisnu dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Integrasi kemitraan yang dibangun oleh Perguruan Tinggi dengan beberapa Instansi sebagai aktivitas akademik dosen mahasiswa dalam mengefektifkan Tridarma Perguruan Tinggi seperti KKN, PPL dan Pengabdian serta Penelitian untuk mengembangkan khazanah keilmuan. Dalam kemitraan perguruan tinggi dengan BMT NU atau Baitul Mal Wattamwil NU dalam pengelolaan dana Bumdesma, pendekatan PAR dapat digunakan untuk melibatkan semua pihak terkait secara langsung. Mahasiswa dan anggota komunitas lokal dapat bekerja sama untuk merencanakan strategi penggunaan dana, menemukan masalah Bumdesma, dan menemukan solusi kreatif. Keterlibatan dan kehadiran Perguruan tinggi pada pendampingan Bumdesma dapat memberikan manfaat bagi Kampus, lembaga keuangan, pengelola Bumdes dan Bumdesma serta masyarakat luas. Keberhasilan Bumdesma sangat ditentukan oleh kemampuan pengurusnya dalam mengelola organisasi dan kegiatan yang dilakukan, sehingga produk dan jasa yang dihasilkan mempunyai keunggulan komparatif dibandingkan pesaing. Oleh karena itu diperlukan perencanaan yang baik dan matang untuk dapat mencapai tujuan Bumdesma meski dalam lingkungan bisnis yang tidak menentu. Perencanaan yang baik Badan usaha desa harus ekonomis, efisien dan efektif.

Kata Kunci: PTKIS, BMT-NU, BumDesma, tatakelola Keuangan

Pendahuluan

Eksistensi keberadaan Perguruan Tinggi harus dirasakan kontribusinya oleh masyarakat dan instansi terkait. Baik lembaga pendidikan, Lembaga Keuangan atau organisasi kemasyarakatan tentu juga terhadap masyarakat sekitar. Perguruan Tinggi

memiliki peran penting ditengah masyarakat dan perlu adanya jalinan kemitraan untuk menjalankan amanah Tridarma Perguruan Tinggi.

Konsep Amanah Tridarma Perguruan Tinggi menjelaskan bahwa perguruan tinggi memiliki *tiga* tanggung jawab utama terhadap masyarakat.

Pertama Pendidikan: Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab untuk memberikan pendidikan berkualitas terhadap mahasiswa sehingga mereka memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Untuk mencapai tujuan ini, perguruan tinggi menyajikan kurikulum yang komprehensif, pengajaran yang inovatif, dan iklim perkuliahan yang berkualitas.

Kedua Penelitian: Tanggung jawab melakukan penelitian untuk mendapatkan pemahaman baru tentang berbagai disiplin ilmu dan teknologi. Perguruan tinggi dituntut untuk berkontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan dan menyelesaikan masalah sosial atau ekonomi yang dihadapi masyarakat dengan melakukan riset kolaboratif dengan mitra industri atau lembaga lainnya dengan melibatkan dosen dan mahasiswa serta masyarakat.

Ketiga Pengabdian Kepada Masyarakat : Tanggung jawab ketiga adalah melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan hasil-hasil pendidikan dan penelitian untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara umum. Hal ini bisa dilakukan melalui program-program seperti pelatihan, penyuluhan atau pemberdayaan masyarakat dalam bidang-bidang tertentu (misalnya kewirausahaan, kesehatan, atau lingkungan), serta partisipasi aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Kemitraan Perguruan Tinggi dengan instansi terkait tentu mengacu terhadap jalinan hubungan baik yang telah dibangun dengan konsep interkoneksi dengan masyarakat. Dengan berpedoman kepada Road Map Penelitian dan Pengabdian yang telah dirancang oleh LP2M melalui MoU dengan beberapa Lembaga antara lain: BMT NU (Baitul Mall Wat Tamwil- Nuansa Ummat), NU Care - Lazisnu dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

Integrasi kemitraan yang dibangun oleh Perguruan Tinggi dengan beberapa Instansi sebagai aktivitas akademik dosen mahasiswa dalam mengejewantahkan Tridarma Perguruan Tinggi seperti KKN, PPL dan Pengabdian serta Penelitian untuk mengembangkan khazanah keilmuan. Dalam hal pengabdian kepada masyarakat,

perguruan tinggi diharapkan dapat memberikan formulasi atau inovasi untuk melakukan pendampingan terhadap Bumdesma (Bumdes Bersama) dalam tata kelola keuangan berbasis syariah sebagai upaya mendukung pembangunan ekonomi lokal secara efektif dengan menggandeng kemitraan Lembaga Keuangan Syariah. (Rahmatika et al. 2019).

Metode Penelitian

Kegiatan dampingan terhadap pembangunan ekonomi lokal melalui pendampingan berkelanjutan terhadap Bumdesma menggunakan pendekatan metodologi PAR (Participatory Action Research) Perguruan Tinggi berkolaborasi dengan BMT NU dan melibatkan masyarakat untuk mencari rule kebutuhan dan solusi dalam pengembangan pembangunan ekonom lokal.

Pendekatan Participatory Action (PAR) adalah metode penelitian yang melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pihak yang terlibat dalam sebuah masalah atau situasi. Dalam pendekatan ini, para peserta penelitian bukan hanya objek pengamatan; mereka juga berpartisipasi aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

Dalam kemitraan perguruan tinggi dengan BMT NU atau Baitul Mal Wattamwil NU dalam pengelolaan dana Bumdesma, pendekatan PAR dapat digunakan untuk melibatkan semua pihak terkait secara langsung. Mahasiswa dan anggota komunitas lokal dapat bekerja sama untuk merencanakan strategi penggunaan dana, menemukan masalah Bumdesma, dan menemukan solusi kreatif.

Dengan Metode pendekatan PAR sebagai pola desain transformasi sosial terhadap perubahan yang diinginkan bersama. Dengan desain ini masyarakat dan pemerintah desa juga dilibatkan untuk sama-sama mencari formula yang ideal sehingga pengelolaan Bumdesma bisa dirasakan oleh rakyat dan keadilan kemanfaatn bisa terpenuhi, tidak adanya intervensi dari pihak manapun.

Strategi dalam dampingan berorientasi pada *Strategi pengelolalan* yaitu tata kelola Bumdesma sesuai dengan amanah PP 11 tahun 2021 (Pemerintah Republik Indonesia 2021). Adapun strategi pengelolaan dimaksud adalah:

1. Berbasis kawasan

2. Produksi berbasis kebutuhan dan sumberdaya lokal
3. Menata kembali kelembagaan lokal. Dalam hal ini pada optimalisasi tatakelola Bumdesma di Kec Cermee Kab Bondowoso.
4. Memperkuat otoritas lokal pada SDM sebagai pengelola Bumdesma.

Metodologi dampingan Bumdesma berdasarkan Mix Metodologi dengan skema berikut ini.



Dari Mix Metode diatas dapat diuraikan sebagai bagai berikut: Pertama, pemetaan gagasan, pemikiran, pandangan masyarakat untuk dipertemukan. Kedua Lifing dan Life mapping adalah membangun cita-cita dan harapan masyarakat kepada perubahan, peningkatan Quality of live. Ketiga, Emancipatory Research – Riset pada dampingan untuk pembebasan, dampingan riset tidak sekedar pengumpulan data dan membuat kesimpulan, akan tetapi dampingan ini dilakukan sebagai perangkat pembelajaran masyarakat melalui proses kolaboratif untuk melakukan perubahan.

Hasil dan Pembahasan

Interkoneksi PTKIS dan BMT NU Dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Lokal Melalui BumDesma Berbasis Tata Kelola Keuangan Syariah di Cermee Bondowoso

Lembaga keuangan pada suatu daerah menjadi kontrol tolak ukur pergerakan perekonomian, geliat stabilitas ekonomi di daerah tertentu perlu adanya kehadiran para pakar dan pelaku ekonomi yang mumpuni dibidangnya. Sehingga pertumbuhan ekonomi pada semua lini baik ketahanan pangan, UMKM dan penekanan angka kemiskinan dan pengangguran mendapat perhatian yang merata.

Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, (UU Desa 2014), memberikan kepada desa beberapa kewenangan, termasuk kewenangan berdasarkan hak asal usul

dan kewenangan lokal berdasarkan ukuran desa. Setiap tahun, Negara memberikan dana melalui APBN kepada Desa untuk mendukung kewenangan tersebut, memungkinkan Desa untuk mengatur dan mengelola kepentingannya dengan lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. Adanya Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) berfungsi sebagai pelaku ekonomi Desa secara kolektif untuk meningkatkan kesejahteraan Desa dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki oleh Desa. (Kirowati and Setia 2018).

Keberadaan Bumdes pada setiap desa yang harusnya memberikan kemanfaatan kepada masyarakat justru tidak dirasakan manfaat dan fungsinya, terlepas dari lemahnya SDM pada sektor pengelola Bumdes serta kecakapan pengelolaan, adanya Bumdes di Desa tidak memberikan kontribusi signifikan baik pada sektor usaha Desa maupun pada ketahanan ekonomi masyarakat.

Oleh karena itu, dukungan yang diberikan oleh negara, sektor industri, akademisi, dan masyarakat umum harus menjadi lebih nyata dan dapat diterapkan untuk desa. Salah satunya adalah dengan mendorong potensi desa untuk mengatasi masalah dan menjaga kesejahteraan dan ketahanan stabilitas ekonomi lokal. Salah satu bentuk pemberdayaan dan pendampingan adalah tata kelola keuangan Bumdesma berbasis keuangan syariah. Manajerial tata kelola keuangan pada segmentasi simpan pinjam ini menjadi acuan terhadap Bumdes karena adanya Bumdesma dibentuk berdasarkan Musyawarah Antar Desa (MAD) sehingga jauh dari intervensi desa. (Devi Deswimar 2014).

Pasal 91 UU Desa mengatur Bumdes Bersama (Bumdesma), yang memungkinkan Desa bekerja sama dengan Desa lain atau pihak ketiga. Kerja sama antar-Desa diatur dalam Peraturan Bersama Kepala Desa melalui persetujuan musyawarah antar-Desa (Pemerintah Republik Indonesia 2021). Perlu adanya pendampingan terhadap Bumdesma oleh Perguruan Tinggi dan BMT NU untuk mengoptimalkan pengelolaan secara proporsional sehingga nasib Bumdesma lebih prospek dalam berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi lokal desa Cermee kab Bondowoso, sehingga sirkulasi keuangan bisa terukur dengan baik.

Perguruan Tinggi harus berperan sebagai agen perubahan sosial di semua aspek masyarakat. Sudah jelas bahwa ini bukan perubahan ke arah kemunduran (kemunduran), tetapi ke arah kemajuan (kemajuan). Perubahan ke arah kemajuan

memerlukan waktu dan proses. Perguruan Tinggi harus memiliki kemampuan untuk masuk ke dalam pola kehidupan masyarakat dan membangun masyarakat sadar terhadap perubahan, bukan masyarakat tahu tanpa melakukan tindakan (aksi). Masyarakat yang sadar mampu menghadapi kehidupan dengan memahami siapa mereka. Karena itu, karakter yang akan muncul adalah karakter yang siap melakukan apa yang terbaik untuk kepentingan umum. (Suryana 2018).

Persolan yang terjadi potensi Bumdesma sangat besar dampaknya terhadap pergerakan perekonomian desa karena dalam kepengurusan Bumdesma merupakan perwakilan dari semua desa yang ada dikecamatan. Sehingga membutuhkan pengelolaan yang proporsional dan akuntabel.

Jika dilihat dari tabel informasi pada laman website Bumdes-kemendesa potensi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi lokal sangat besar. Berikut data Bumdes dan Bumdesma.



Klasifikasi data di atas baik Bumdesa dan Bumdesma menunjukkan angka yang variatif. Bumdes yang berbadan hukum sebanyak 14387 sedangkan Bumdesma mencapai angka 1237. Tentu perputaran perekonomian di bidang simpan pinjam Bumdesma karena segmentasi Bumdesma lebih dominan pada simpan pinjam akan berpotensi statis jika tidak dikelola dengan pengelolaan yang sesuai dengan standar lembaga keuangan.

Kehadiran Perguruan tinggi yang berkolaborasi dengan lembaga keuangan berbasis syariah mempunyai tanggung jawab sosial dan moral untuk melakukan

pendampingan pada tata kelola Bumdesma yang ada di Kec Cermee Kab Bondowoso.

Realitas Pengelolaan Dana Bumdesma

Pengelolaan Bumdesma dan Bumdes pada tingkatan desa tidak berdampak signifikan pada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pelaku UMKM dan pelaku Home industry serta pedagang kecil lainnya banyak yang belum merasakan sentuhan dari adanya Bumdes dan Bumdesma sehingga Masyarakat masih berusaha sendiri untuk tetap bertahan dalam kondisi apapun.

Sulitnya mendapatkan pengembangan usaha mikro ditengah masyarakat banyak yang menempuh jalan pintas mencari sumber dana usaha pada penyedia pinjaman mandiri seperti rentenir dan penyedia keuangan yang tidak berbadan hukum. Tentu dengan bunga pinjaman yang tinggi, sehingga masyarakat mengeluh dan pergerakan perekonomian di tingkat desa lesuh.

SDM pengelola pada Bumdesma jarang sekali mendapatkan pelatihan atau penguatan pengelolaan aset keuangan desa sehingga progress Bumdesma kondisinya tidak jauh berbeda dengan Bundes yang ada di desa. Padahal jika dikelola dengan baik dengan mengacu pada penguatan Bumdes yang diatur dalam PP 11 tahun 2021 seharusnya Bumdes menjadi acuan dasar perumbuhan ekonomi masyarakat khususnya pada sektor Bumdes, seperti gambar yang dikutip pada laman bumdes-kemendesa go.id:



Dari gambar ini menunjukkan seluruh kegiatan pada Bumdes dan Bumdesma menjadi terukur, baik pengelola, alokasi dan pengembangan distribusinya jelas harus dirasakan oleh masyarakat dan pola pembanguna sektor ekonom yang sistematis.

Integrasi Kemitraan PTKIS dengan BMT-NU Terhadap Bumdesma

Rancangan dampingan pada Bumdes dan Bumdesma ini, berdasarkan pada pendampingan sebelumnya oleh peneliti dan akademisi. Pendampingan ini merupakan program dampingan lanjutan serta berkesinambungan oleh peneliti dengan melibatkan lembaga keuangan syariah BMT NU yang merupakan mitra Ummat untuk menjadikan lembaga keuangan di tingkat desa menjadi lembaga keuangan yang professional, tertata dan terukur serta ada progress pada pembangunan ekonomi lokal.

Harapan selanjutnya menekan angka kemiskinan dan pengangguran serta menjadi mitra strategis para pelaku usaha mikro khususnya home industry dan pelaku UMKM. Keterlibatan dan kehadiran Perguruan tinggi pada pendampingan Bumdesma dapat memberikan manfaat bagi Kampus, lembaga keuangan, pengelola Bumdes dan Bumdesma serta masyarakat luas. Kemudian adanya dampingan ini didesain dengan pola dampingan keberlanjutan yang manfaatnya sebagai berikut:

1. Kemitraan Perguruan Tinggi dan lembaga Keuangan terus terjalin dengan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat dan instansi desa.
2. Terbentuknya desa atau Bumdes dan Bumdes binaan Perguruan Tinggi sehingga mudah untuk melakukan kontroling pertumbuhan ekonomi pada sektor usaha.
3. Pengelolaan yang sistematis tepat sasaran karena berbasis perbakan dan lembaga keuangan.
4. Terciptanya desa mandiri dengan SDM yang mumpuni pada bidang pengelolaan keuangan.

Adapun pihak terkait pada pelaksanaan dalam dampingan Bumdesma di Kecamatan Cermee sebagai berikut:

- 1) Mahasiswa STAI Nurul Huda Kapongan Situbondo
- 2) Pimpinan Baitul Mal Wattamwil NU Kecamatan Cermee
- 3) Seluruh Kepala Desa dan Forkopimka Cermee

- 4) Pendamping Desa PD/PLD Kecamatan Cermee
- 5) Karang Taruna tingkat Kecamatan dan Desa

Kehadiran PTKIS terhadap lembaga Keuangan sektor kelembagaan desa perlu mendapat perhatian serius. Strategi tertentu diperlukan agar pemberdayaan masyarakat dapat berhasil. Strategi-strategi tersebut meliputi(Suryana 2018):

Pertama, harus diketahui terlebih dahulu budaya masyarakatnya, baik dari segi sosiologi-antropologi, politik, ekonomi, dan psikologis. Untuk mengetahui budaya masyarakat pada umumnya dan pada khususnya dilakukan melalui proses pemetaan sosial. Dalam pemetaan sosial, kami mempertimbangkan potensi lokasi, adat istiadat masyarakat, sebaran masyarakat, identifikasi wilayah yang kurang berdaya, dan panutan masyarakat yang dianggap berpengaruh. Hasil kajian pemetaan swadaya menjadi data awal yang akan dijadikan acuan kedepannya dalam melaksanakan kegiatan tatakelola di lembaga Keuangan pada Bumdesma.

Kedua, membuat komitmen bersama kepada masyarakat tentang kegiatan pemberdayaan yang akan dilaksanakan di masyarakat. Hal ini harus dilakukan agar proses pemberdayaan dapat berhasil. Proses pengambilan komitmen bersama dilakukan melalui konsultasi publik. Dalam diskusi komunitas, masyarakat diminta untuk berpartisipasi aktif dalam pembentukan ide-ide konstruktif demi kemajuan masyarakat secara keseluruhan. Kegiatan partisipatif harus dilakukan di tingkat akar rumput dan di tingkat pemerintahan desa/kelurahan. Selain itu, pengambilan komitmen bersama harus membuahkan hasil, antara lain: kesediaan masyarakat untuk ikhlas melakukan kegiatan pemberdayaan (tanpa mengharapkan imbalan apa pun) dan kesediaan membantu semaksimal mungkin.

Ketiga, perlu mempertimbangkan masyarakat sebagai subjek, bukan objek kegiatan pemberdayaan. Dengan cara ini diharapkan akan timbul persepsi kritis masyarakat sehingga nantinya akan memimpin proses tersebut. Masyarakat ditantang untuk mengenali permasalahan dan potensi yang ada di daerahnya dan kemudian ditantang untuk belajar bagaimana mengatasi berbagai permasalahan yang ada. Pada hakikatnya metode pemberdayaan yang digunakan adalah partisipatif. Pendekatan ini menuntut partisipasi masyarakat dalam keseluruhan proses pemberdayaan.

Keempat, adanya forum yang dibentuk oleh masyarakat dengan fungsi adaptasi, pengambilan kebijakan, dan wadah belajar masyarakat. Pegawai organisasi hasil seleksi di masyarakat yang memenuhi kriteria tertentu dianggap baik oleh masyarakat. Direkomendasikan agar metode pemilihan staf forum tetap independen terhadap aktivitas politik tertentu. Pasalnya, kegiatan pemberdayaan merupakan gerakan yang murni beretika berdasarkan prinsip-prinsip luhur atau nilai-nilai kemanusiaan.

Menjalankan suatu usaha tidak lepas dari adanya sumber pendanaan yang mendukung. Dunia usaha memandang kehadiran perbankan sebagai lembaga keuangan yang memberikan layanan simpan pinjam. Identifikasi permasalahan praktis menunjukkan bahwa pelaku ekonomi sangat terbantu dalam mencari sumber pendanaan untuk mengembangkan kegiatannya. Melalui program KUR, masyarakat bisa mendapatkan modal usaha dengan bunga rendah, artinya unit usaha di desa atau BUMDesma tidak ada alasan untuk tidak mempunyai modal yang cukup untuk mengembangkan usahanya. Hubungan kerja sama antara BUMDesma dengan perbankan harus tetap dijaga, karena dengan adanya kepercayaan perbankan terhadap pembiayaan maka dapat digunakan untuk pengembangan perusahaan secara berkelanjutan, sehingga pada saat beroperasi tidak akan mengalami kesulitan dalam mencari sumber pembiayaan. . Sektor lembaga keuangan dalam dunia usaha memegang peranan yang sangat penting. Oleh karena itu, untuk membantu pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan usaha, industri perbankan menciptakan kondisi yang menguntungkan untuk mengatur proses perkreditan untuk kegiatan usaha. Masyarakat kecil pun bisa mendapatkan modal untuk memulai usaha jika mereka mempunyai kemauan dan tekad untuk mengembangkan usaha di desa.

Oleh karena itu, dukungan dari negara, pelaku industri hingga akademisi dan masyarakat pada umumnya harus diubah bentuknya menjadi lebih nyata dan spesifik untuk desa. Salah satunya adalah peningkatan potensi desa sebagai solusi dan keberlanjutan kesejahteraan desa di masa depan. Salah satu bentuk pemberdayaan pemerintah adalah otonomi desa, artinya desa dapat mengelola sumber daya secara mandiri, termasuk melalui Bumdes Bersama. BUMDesma dikelola oleh pemerintah desa bekerjasama dengan masyarakat.(Hardyani Yorry 2022). Capaian yang

diharapkan oleh tim pengabdian pada kegiatan ini adalah tingginya partisipasi masyarakat dalam sosialisasi ini. Maksud tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya pengurus Bumdesma dan tokoh desa tentang manfaat pengelolaan Bumdesma yang baik. Kegiatan ini berhasil menarik perhatian dan minat masyarakat untuk mengetahui lebih jauh mengenai pengelolaan Bumdesma yang baik.

Kesimpulan

Peran aktif perguruan tinggi dan perbankan memberikan kontribusi terhadap pengembangan Bumdesma dari segi sumber daya manusia dan keuangan. Sumber daya manusia yang unggul dan inovatif tentunya memberikan dampak yang sangat positif terhadap pertumbuhan unit bisnis dengan menciptakan produk dan ide pemasaran yang mampu menembus segmen pasar global dan mempunyai kemampuan bersaing dengan produk lain serta sumber daya manusia yang mampu mengelola organisasi dengan baik. Sumber pembiayaan yang mudah diakses dapat mendukung kelangsungan usaha, tidak lagi menutup usaha karena kekurangan modal untuk tumbuh menjadi unit usaha yang inovatif dan mandiri.

Keberhasilan Bumdesma sangat ditentukan oleh kemampuan pengurusnya dalam mengelola organisasi dan kegiatan yang dilakukan, sehingga produk dan jasa yang dihasilkan mempunyai keunggulan komparatif dibandingkan pesaing. Oleh karena itu diperlukan perencanaan yang baik dan matang untuk dapat mencapai tujuan Bumdesma meski dalam lingkungan bisnis yang tidak menentu. Perencanaan yang baik Badan usaha desa harus ekonomis, efisien dan efektif

Penguatan kelembagaan Bumdesma dapat berupa kelompok usaha. Pekerjaan teknis yang dilakukan meliputi penguatan kelembagaan kelompok, termasuk dukungan sumber daya manusia, teknologi, dan kelembagaan. Selain itu, sektor praktis (usaha ekonomi produksi) dan sektor keuangan (lembaga keuangan) di tingkat desa juga dikembangkan. Kedua, kemitraan telah dikembangkan antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan sektor swasta. Peran pemerintah dan lembaga perbankan serta upaya lebih lanjut perlu dilakukan untuk menggali

seluruh potensi sinergi antara kelompok tani dan mitra, termasuk upaya mendorong inovasi teknologi.

Daftar Pustaka

- Devi Deswimar, Almasri; 2014. “Peran Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pembangunan Pedesaan.” *Jurnal EL-RIYASAH* 5 (1): 41. <https://doi.org/10.24014/jel.v5i1.657>.
- Hardyani Yorry. 2022. “Sosialisasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa.” *Transformasi : Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat* 2 (1): 1–7.
- Kirowati, Dewi, and Lutfiyah Dwi Setia. 2018. “Pengembangan Desa Mandiri Melalui Bumdes.” *Jurnal AKSI (Akuntansi Dan Sistem Informasi)* 1 (254–3198): 16. <http://journal.pnm.ac.id/index.php/aksi/article/view/60>.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2021. “Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2021.” *Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa*, no. Badan Usaha Milik Desa: 1–71.
- Rahmatika, Dien Noviany, Setyowati Subroto, Dewi Indriasih, and Deddy Prihadi. 2019. “Strategi Pengembangan Kualitas Bumdes; Pendekatan Model Tetrapreneur Serta Kemitraan Dengan Perguruan Tinggi Dan Perbankan.” *Jurnal Industri Kreatif Dan Kewirausahaan* 2 (2): 84–95. <https://doi.org/10.36441/kewirausahaan.v2i2.58>.
- Suryana, Sayan. 2018. “Peran Perguruan Tinggi Dalam Pemberdayaan Masyarakat.” *Jurnal Pendidikan Islam Rabbani* 2 (2): 368–78. <https://journal.unsika.ac.id/index.php/rabbani/article/view/1443>.
- UU Desa. 2014. “UU Desa No 6 Tahun 2014.”